

PULUHAN PELAJAR PELATIHAN

Dispar Siapkan Generasi Ekonomi Kreatif

WONOSARI (KR) - Kepala Dinas Pariwisata (Dispar) Gunungkidul Oneng Windu Wardana membuka Pelatihan Peningkatan Ekosistem Ekonomi Kreatif di Uthy Bakery Resto Playen, Selasa (23/7). Kegiatan selama tiga hari diikuti 40 peserta perwakilan 12 sekolah se Gunungkidul.

”Ekonomi kreatif memiliki keterikatan penuh terhadap pariwisata. Karena dipandang sebagai suatu ekosistem yang di dalamnya terdapat hubungan saling bergantung diantara rantai nilai kreatif, lingkungan pengembangan, pasar dan dokumentasi,” kata Kepala Dispar Gunungkidul Oneng Windu Wardana.

Hari pertama, peserta mendapat pelatihan seni pertunjukan, seni rupa, dan fashion. Kemudian hari kedua, diberikan pela-



Pelatihan peningkatan ekonomi kreatif.

KR-Dedy EW

atihan fotografi, kriya batik, dan pemasaran. Sedangkan hari ketiga, digelar praktek kerajinan tenun di Gamplong, Sleman, DIY.

Diungkapkan, ekonomi kreatif merupakan perwujudan nilai tambah kekayaan intelektual yang bersumber dari kreativitas manusia. Sementara Kepala Bidang Ekonomi Kreatif dan Industri Pariwisata Gunungkidul Hari Susanto me-

nambahkan pelatihan ekosistem ekonomi kreatif selain mengenalkan potensi ekonomi kreatif di Gunungkidul kepada pelajar, juga meningkatkan minat dan bakat pelajar. Terhadap pengembangan ekosistem ekonomi kreatif. ”Tujuan diadakan pelatihan ini menjadi media regenerasi pelaku ekonomi kreatif dalam penguatan ekosistem,” jelasnya. (Ded)

PELANTIKAN ANGGOTA DPRD

KPU Serahkan Berkas Kelengkapan Administrasi

WATES (KR) - KPU Kabupaten Kulonprogo menyerahkan Berkas Kelengkapan Administrasi Pelantikan Anggota DPRD Kabupaten Kulonprogo Periode 2024-2029 kepada Gubernur DIY melalui Pj Bupati Kulonprogo Ir Srie Nurkyatsiwi MMA. Selanjutnya akan diserahkan secara serentak bersama Kabupaten yang lain sebelum tanggal 25 Juli 2024 kepada Gubernur DIY.

Dikatakan Ketua Divisi Teknis Penyelenggaraan Pemilu KPU Kulonprogo Hidayatut Thoyyibah, salah satu berkas syarat pelantikan anggota DPRD kabupaten Kulonprogo yang harus dilengkapi adalah tanda terima LHKPN Calon. Sampai saat diserahkan, telah terkumpul

tanda terima LHKPN dari 39.

”Atas belum diterimanya tanda terima LHKPN, KPU Kulonprogo menggunakan Surat Dinas PLT. Ketua KPU nomor 1262, pada point 4, disebut bahwa bagi calon anggota DPRD kabupaten yang telah memenuhi kewajiban untuk menyampaikan laporan harta kekayaan kepada KPK, tetapi belum memperoleh tanda terima laporan harta kekayaan sampai batas waktu 21 hari sebelum pelantikan, maka calon terpilih yang bersangkutan dapat menyerahkan bukti pelaporan LHKPN dan surat pernyataan belum memperoleh bukti tanda terima pelaporan, disertai bukti pelaporan kepada KPK,” pungkashidayatut Thoyyibah, Rabu (24/7). (Wid)

AGUSTUS UNTUK PELANTIKAN ANGGOTA BARU

Komisi C Sidak Pembangunan Gedung DPRD

WONOSARI (KR) - Dalam rangka memastikan gedung DPRD yang baru dapat untuk pelantikan anggota DPRD 2024-2029, Komisi C melakukan inspeksi mendadak (Sidak) pembangunan gedung tersebut. Rombongan didampingi Sekretaris Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman (DPUPRKP) Wayu Ardi Nugroho SSTP MA beserta sejumlah pejabat dari Bidang Cipta Karya.

Sekarang ini masih ada dua pekerjaan, terdiri pemasangan interior tiga lokasi dan landscape atau halaman. Batas waktu pengerjaan interior tanggal tanggal 28 Juli ini , semntara landscape 6 Agustus.

”Komisi minta agar dilakukan percepatan pekerjaan dan selesai sesuai jadwal waktu,” kata Wakil Ketua Komisi C DPRD Gunungkidul Demas Kursis-



Demas Kursiswanto bersama anggota komisi C lainnya cek pembangunan gedung DPRD.

KR-Endar Widodo

wanto, Selasa (23/7).

Anggota komisi yang ikut melihat pembangunan gedung, Timbul Suryanto dan Maryanta. Untuk pekerjaan interior sudah selesai 90 persen, sehingga tinggal pemasangan interior dilantai atas dan ruang rapat paripurna.

Sementara untuk landscape yang berat tinggal pengaspalan. Untuk pekerjaan halaman kantor ini

baru mencapai 45 persen, tetapi jika sudah dilakukan pengaspalan dapat dipastikan segera rampung. Komisi C akan melakukan pemeriksaan lagi sebelum jadwal pengerjaan berakhir. Komisi ingin pada batas waktu nanti semuanya sudah beres, ruang rapat paripurna dapat untuk pelantikan anggota DPRD yang baru.

(Ewi/Bmp)

PANEN CABAI DI WONOSARI

1.000 Meter Persegi Hasilkan Rp 7,8 Juta



Panen cabai di Duwet Kapanewon Wonosari.

WONOSARI (KR) - Kelompok Tani Handayani Kalurahan Duwet, Wonosari, Gunungkidul berhasil meraih sukses dengan memanen cabai keriting lokal Selasa (23/7) kemarin. Bupati Gunungkidul H Sunaryanta mengapresiasi saha kelompok tani Handayani yang telah berhasil membudidayakan tansman cabai dan hal ini sangat penting untuk menstabilkan inflasi dan menjaga harga bahan pokok tetap terjangkau. Dengan keberhasilan itu pihaknya menekankan pentingnya mensyukuri hasil

dul belum mampu memenuhi kebutuhan ini sepenuhnya dan masih harus mendatangkan dari luar,” kata Sunarya Selasa (23/7).

Bupati H Sunaryanta mengapresiasi saha kelompok tani Handayani yang telah berhasil membudidayakan tansman cabai dan hal ini sangat penting untuk menstabilkan inflasi dan menjaga harga bahan pokok tetap terjangkau. Dengan keberhasilan itu pihaknya menekankan pentingnya mensyukuri hasil

kerja keras para petani, serta terus mendukung program-program yang bisa membantu pemerataan perekonomian berbasis lokal, khususnya di sektor pertanian. ”Kami berharap pada tahun 2025 akan ada lebih banyak dukungan untuk sumur ladang, sehingga perekonomian wilayah bisa lebih maju dan makmur,” imbuhnya.

Lurah Duwet, Warsito mengatakan, panen kali ini merupakan panen kelima yang membutuhkan masa tunggu 120 hari, untuk luasan lahan 1.000 meter berhasil mengumpulkan hasil panen sebanyak 4,8 kuintal dengan nilai penjualan mencapai Rp 7,8 juta.

Keberhasilan ini tidak lepas dari bimbingan penyuluh yang menerapkan teknologi tanam sisip, di mana di antara cabai-cabai ini juga ditanami sawi dengan luas lahan 1000 meter. (Bmp)

DISAMPAIKAN WABUP GUNUNGKIDUL

APBD Perubahan Defisit Anggaran Rp 58 Miliar

WONOSARI (KR) - Wakil Bupati Gunungkidul Heri Susanto SKom MSi menyampaikan Nota Keuangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dalam rapat paripurna yang dipimpin oleh Wakil Ketua DPRD Suharno SE, Rabu (24/7).

Pada pokoknya rancangan APBD perubahan ini perlu dilakukan untuk menyesuaikan dengan kebijakan dalam pelaksanaan pembangunan selama ini.

Salah satu point pentingnya dalam RAPBD Perubahan ini terjadi defisit anggaran sebesar Rp 58.595.094.574,76 Defisit anggaran akan ditutup dengan sisa lebih perhitungan anggaran (SILPA) tahun 2023 sebesar Rp 76.595.094.545,76.

”Selisih Silpa yang digunakan untuk menutup de-



KR-Endar Widodo

Wabup serahkan dokumen RPABD Perubahan kepada Wakil Ketua DPRD Suharno SE

daerah naikmenjadi sebesar Rp 290.103.628.524,-.

Sementara pendapatan transfer naik menjadi Rp 1.777.233.622.232,- Lain-lain pendapatan daerah yang sah sebesar Rp 600.000.000,00 Sedangkan belanja daerah menjadi sebesar Rp 2.126.532.345.33 terdiri,

belanja operasi naik menjadi Rp1.648.921.181.392, belanja modal naik menjadi Rp146.350.064.964,- sementara belanja tidak terduga (BTT) turun menjadi sebesar Rp 4.026.260.000,- belanja transfer naik menjadi sebesar Rp 327.234.838.975. (Ewi)

BANK BPD DIY KUCURKAN DANA CSR

Komitmen Dukung Program ‘SekilanKu’

GIRIMULYO (KR) - Program Sekolah Peduli Lingkungan Kulonprogo (SekilanKu) yang digagas Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga (Disdikpora) Kulonprogo bersama mitra kerjanya mendapat sambutan positif Pj Bupati setempat Srie Nurkyatsiwi. Kegiatan tersebut dilaksanakan sebagai upaya meningkatkan kepedulian lingkungan di satuan pendidikan.

”Saya mengapresiasi dan mendukung Program SekilanKu. Program ini terbukti menciptakan sekolah yang nyaman, aman dan harmonis bagi kebutuhan belajar peserta didik. Anak-anak akan jadi generasi peduli dan berbudaya lingkungan,” katanya saat Apresiasi Pilot Project SekilanKu Jenjang Sekolah Dasar di SDN Kalisonggo, Tempel, Kalurahan



KR-Asrul Sani

Nur Affan Dwi Saputro menandatangani komitmen Membangun Budaya SekilanKu disaksikan Pj Bupati Srie Nurkyatsiwi (kiri).

Pendoworejo, Kapanewon Girimulyo, Kulonprogo, Selasa (23/7).

Dalam kesempatan tersebut Siwi menyerahkan penghargaan pada Kepala SDN Kalisonggo Rumiya SPd. Acara juga diwarnai penandatanganan Komitmen Membangun Budaya SekilanKu oleh para pejabat dilanjutkan menyaksikan hasil karya siswa.

Untuk mendukung suksesnya Program SekilanKu, Bank BPD DIY, Baznas Kulonprogo dan mitra kerjanya Disdikpora menyerahkan CSR.

Pihaknya berharap SekilanKu bisa mengubah perilaku warga sekolah dalam pengelolaan lingkungan dengan melaksanakan gerakan peduli dan berbudaya lingkungan, sekaligus

jadi mitra pemkab melaksanakan pengelolaan sampah guna mewujudkan Kulonprogo bersih dan sehat.

Pimpinan Bank BPD DIY Cabang Wates, Nur Afan Dwi Saputro menjelaskan, CSR Rp 119 juta diserahkan secara simbolis pada Kepala Disdikpora Nur Wahyudi. Bantuan itu wujud komitmen tanggung jawab sosial dan lingkungan Bank BPD DIY dalam mendukung Program SekilanKu.

”Program SekilanKu selaras dengan upaya pemerintah daerah dalam menangani masalah darurat sampah DIY. Kami berharap program tersebut bisa memberi pendidikan dan edukasi pada para siswa mengenai penanganan sampah dan kepedulian terhadap lingkungan,” kata Afan. (Rul)

Penjabat Bupati Kukuhkan Anggota BPK Se-Kulonprogo

WATES (KR) - Perubahan masa jabatan diharapkan dapat meningkatkan efektivitas dan kesinambungan kinerja Badan Permusyawaratan Kalurahan (BPK) dalam menjalankan fungsi pengawasan, perencanaan dan evaluasi pembangunan di kalurahan.

”Penambahan masa jabatan dua tahun diharapkan bisa meningkatkan kinerja anggota BPK, dalam hal ini pada pelaksanaan tugas fungsinya yaitu membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Kalurahan bersama Lurah, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat kalurahan dan melakukan pengawasan kinerja lurah,” tegas Pj. Bupati Kulonprogo, Ir Srie Nurkyatsiwi saat mengukuhkan anggota



KR-Asrul Sani

Penjabat Bupati Kulonprogo Srie Nurkyatsiwi MMA menyerahkan SK Pengukuhan Anggota BPK se-Kabupaten Kulonprogo.

ta BPK se-Kulon Progo di Aula Adikarta Komplek Kantor Bupati Kulonprogo, Wates, Senin (22/7).

Pengukuhan BPK sesuai Undang-Undang Nomor 3/2024 tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 6/2014 tentang Desa, yang mengubah masa jabatan

anggota BPK dari enam tahun menjadi delapan tahun.

Ditegaskan, pengukuhan tidak hanya sebagai tindak lanjut dari ketentuan hukum, tapi juga sebagai langkah penting dalam memperkuat tata kelola pemerintahan di tingkat kalura-

han. Penjabat Bupati Siwi berharap BPK tidak hanya sebagai lembaga yang memberikan stempel formalitas saja, tapi menjadi lembaga yang terlibat sejak dalam proses perencanaan dan pelaksanaan, memiliki atribut fungsi legislasi dan fungsi pengawasan serta sebagai bentuk representasi warga masyarakat yang diwakilinya.

Sementara itu Plt. Kepala Dinas PMD Daldud dan KB Kulonprogo, Jazil Ambar Was’an mengatakan, Keputusan Bupati yang diterbitkan antara lain pertama, mengubah masa jabatan 667 anggota BPK se-Kabupaten Kulonprogo. Dari semula masa jabatan tahun 2020 - 2026 menjadi masa jabatan dari 2020 - 2028. (Rul)

Kawasan Kumuh Masih 72,63 Hektare

WATES (KR) - Berdasar SK Bupati No 416/A/ Tahun 2020 Kawasan Kumuh di Kabupaten Kulonprogo seluas 151,77 hektar dan sudah ditangani dari 2020 hingga 2023, sehingga akhir 2023 masih ada sisa 72,63 hektar. Sedangkan tahun 2024 masih dalam proses penghitungan sehingga belum selesai.

Hal itu dikatakan Sulung Ambang Sujagad ST MT Kabid Perumahan dan Permukiman pada Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman (DPUPKP) Kulonprogo dalam Focus Group Discussion (FGD) Forum Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Kabupaten Kulonprogo. FGD bertepatan ”Penuntasan Kawasan Kumuh untuk Pemukiman yang Berkelanjutan”

Pembangunan Permukiman yang Berkelanjutan”, Rabu (24/7), di Terraskota Giripeni Wates.

Acara yang dibuka Asisten 2 Setda Kulonprogo Ir Bambang Tri Budi Harsono MM ini menampilkan Sulung sebagai narasumber bersama Paulus Bawole Dosen Fakultas Arsitektur dan Desain Universitas

Kristen Duta Wacana (UKDW).

”Untuk kawasan kumuh 2025-2029 nanti akan diterbitkan SK Bupati tentang penanganan kumuh kembali. Hanya saja penghitungan dalam proses masih di tangan konsultan dan kita, diharapkan akhir tahun 2024 bisa diketahui jumlah luasan-



KR-Widiastuti

Pelaksanaan FGD Forum PKP.

nya,” ujar Sulung. Dijelaskan, suatu kawasan dikatakan kumuh kriterianya ada beberapa seperti kondisi bangunan, jalan lingkungan, air minum, drainase, air limbah, persampahan dan proteksi kebakaran.

”Di Kulonprogo kebanyakan kekumuhannya didominasi kurangnya jalan lingkungan, kurangnya drainase dan akses air minum aman, proteksi kebakaran di permukiman. Ini banyak mewarnai kekumuhan di Kulonprogo, tapi kumuhnya masih ringan

Luasan kumuh yang paling banyak menurut SK Bupati tahun 2020 di Kawasan Wates, Giripeni, sehingga banyak membutuhkan penanganan,” katanya. (Wid)